

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kudus

Kudus memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Gebog, Dawe, Jekulo, Bae, Mejobo dan Undaan. Dari kesembilan kecamatan yang terbagi di Kudus terdapat empat dapil dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Nomor ; 32/PL.01.3/BA-3319/KPU-Kab/II/2018 yaitu :

**Tabel 4.1 Penetapan Daerah Pemilih dan Alokasi  
Kursi Anggota DPR Kabupaten Kudus**

No	Kecamatan	Jml Penduduk	Total Jml Penduduk	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi
1	Kota Jati	91.087 105.671	196.758	Dapil I	11
2	Kaliwungu Gebog	100.856 102.164	203.020	Dapil II	11
3	Dawe Jekulo	104.666 106.538	211.204	Dapil III	11
4	Bae Mejobo Undaan	71.026 75.978 74.695	221.699	Dapil IV	12

Sumber : Bawaslu.Kudus,go.id

Kudus memiliki 9 kecamatan dengan pembagian 4 dapil, dapil I yaitu Kecamatan Kota dan Jati, Dapil II yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Gebog, dapil III Kecamatan Dawe dan Jekulo serta dapil IV Kecamatan Bae, Mejobo dan Undaan.

Dari data info publik Pemilu tingkat nasional dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terdapat presentase 55,32% untuk kemenangan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sedangkan pasangan selanjutnya adalah H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno yang memperoleh suara sebanyak 44, 68%. Perolehan keduanya secara keseluruhan dalam data pemilu 2019 dari KPU pada tanggal 19 Desember 2019 maka persentase berada di angka 99,52074% atau dapat dikatakan partisipasi masyarakat Indonesia dalam Pemilu 2019 sudah baik.

**Tabel 4.2 Hasil Pemilu 2019 Pileg DPRD  
Kabupaten/Kota di Kudus**

Wilayah Partai Politik	Bae (100 %)	Dawe (100 %)	Gebog (100 %)	Jati (100 %)	Jekulo (100 %)	Kali- wungu (100 %)	Kudus (100 %)	Mejorbo (100 %)	Undaan (100 %)
PKB	6.29 1	8.29 5	9.47 2	6.67 6	17.6 44	7.01 5	10.1 89	7.97 5	1.69 4
Gerindra	10.6 81	10.3 31	5.02 0	8.39 6	5.16 9	8.73 2	6.23 1	11.8 32	4.38 9
PDIP	4.27 7	5.36 2	5.45 5	18.3 43	5.42 2	17.4 83	12.1 76	1.37 0	13.8 79
Golkar	6.49 5	8.32 6	5.26 4	4.71 5	8.88 4	11.3 22	2.44 9	6.68 1	7.13 3
NasDem	2.57 5	5.81 8	5.38 2	4.65 6	5.69 7	2.81 8	1.57 9	1.27 6	4.42 4
Garuda	311	840	1.42 4	79	2.60 5	460	128	141	225
Berkarya	391	1.31 8	651	493	628	748	897	604	298
PKS	2.84 6	4.55 3	3.60 8	4.69 8	5.55 4	2.80 8	5.01 5	2.27 6	2.38 6
Perindo	1.68 2	2.92 9	539	2.52 1	1.82 0	551	1.05 5	565	391
PPP	1.32 3	3.53 2	7.10 6	2.08 0	1.06 1	1.97 0	3.25 5	4.33 7	3.95 4
PSI	510	561	284	968	299	118	2.14 5	181	384
PAN	2.41 4	1.86 1	5.63 4	3.39 5	3.44 5	3.34 7	2.70 6	4.32 9	2.62 5
Hanura	2.60 1	1.33 5	3.03 8	4.16 1	3.24 1	1.09 9	3.83 1	4.09 0	3.67 1
Demo krasi	407	4.46 7	2.74 9	3.41 6	2.71 7	624	2.50 8	2.50 1	493
PBB	85	76	3.57 8	176	210	309	392	27	21
PKPI	64	66	221	223	69	19	81	26	22

Data Pemilu 2019 Pileg DPRD Kab/Kota

(Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>)

Pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus memperoleh hasil suara pada partai politik dimenangkan posisi pertama oleh PDIP dengan prosentase sebesar 17,01% dengan jumlah total suara 86.069 dari keseluruhan dapil di Kabupaten Kudus. Posi kedua dimenangkan oleh PKB yang perolehan suara sebesar 14,98% dengan jumlah suara sebanyak 75.760 total suara, lalu disusul oleh Partai Gerindra dengan persentase sebesar 14,08% dengan jumlah total suara sebanyak 71.247 suara.<sup>1</sup>

Perolehan suara pemilu legislatif tahun 2019 di Kudus dilihat dari kemenangan tiga partai besar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PKB merupakan partai dengan basis Islam besar yang mampu menyaingi partai nasional di Kudus. Kudus merupakan kabupaten yang kental dengan Islam bahkan memiliki julukan Kota Santri, hal tersebut mampu menjadi salah satu bukti bahwa eksistensi partai Islam terutama PKB cukup di dukung masyarakat Kudus.

## 2. Kecamatan Jekulo

Jekulo merupakan wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Dawe di bagian utara, Kabupaten Pati di bagian selatan dan timur serta di bagian barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Mejobo dan Bae. Data luas Kecamatan Jekulo diatur langsung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.1 Tahun 2015 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Wilayah Kecamatan Jekulo memiliki luas 82,92 km<sup>2</sup> dengan wilayah desa terluas di Desa Bulong Kulon yaitu 14,86 km<sup>2</sup> dan wilayah terkecil yaitu Desa Jekulo yang hanya 2,24km<sup>2</sup>.

Kecamatan Jekulo terbagi menjadi 12 desa yaitu Desa Sadang, Bulungcangkring, Bulung Kulon, Sidomulyo, Gondoharum, Terban, Pladen, Klaling, Jekulo, Hadipolo, Tanjungrejo, dan Honggosoco. Kecamatan Jekulo memiliki wilayah administrasi pemerintahan 12 desa, 45 dusun, 85 RW (Rukun Warga) dan 439 RT (Rukun Tetangga). Kepegawaian pemerintahan di Kecamatan Jekulo terdiri dari 213 orang yang merupakan 174 laki-laki dan 39 perempuan yang menjadi aparat pemerintah desa di Kecamatan Jekulo.

---

<sup>1</sup> Tim Humas Bawaslu Kudus, "Hasil Pleno: PDIP Raih Kursi Terbanyak Untuk DPRD Kabupaten Kudus", Bawaslu Kabupaten Kudus, <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/hasil-pleno-pdip-raih-kursi-terbanyak-untuk-dprd-kabupaten-kudus>

Tercatat tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Jekulo sebanyak 109.989 jiwa yang terdiri dari 55,770 jiwa atau 50,71% perempuan dan 54.219 jiwa atau 49,29% laki-laki. Penduduk Kecamatan Jekulo sebagian besar bermata pencaharian pedagang, petani, angkutan dan buruh industri/bangunan. Masyarakat Jekulo sendiri mayoritas beragama Islam, ada sebesar 99,2% masyarakatnya adalah beragama Islam, dan sisanya 0,7% beragama Kristen Protestan.

Kecamatan Jekulo memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari<sup>2</sup>:

1. Sarana Pendidikan :
  - a. TK (Taman Kanak-kanak) : 29 Sekolah
  - b. SD (Sekolah Dasar) : 60 Sekolah
  - c. SLTP : 5 Sekolah
  - d. SMU : 1 Sekolah
  - e. SMK : 3 Sekolah
  - f. MI (Madrasah Ibtidaiyah) : 14 Sekolah
  - g. MTS (Madrasah Tsanawiyah) : 7 Sekolah
  - h. MA (Madrasah Aliyah) : 4 Sekolah
2. Sarana dan prasarana kesehatan
  - a. Rumah sakit : 1 Unit
  - b. Puskesmas : 2 Unit
  - c. Puskesmas pembantu : 8 Unit
  - d. Tempat praktek dokter : 13 Unit
  - e. Rumah bersalin : 5 Unit
  - f. Apotik/toko obat : 4 Unit
  - g. Dokter : 13 orang
  - h. Paramedis : 127 orang
  - i. Tukang pijat : 27 orang
3. Sarana agama
  - a. Masjid : 79 bangunan
  - b. Gereja : 5 bangunan
4. Sarana dan prasarana umum
  - a. Kolam renang : 1 buah
  - b. Museum purbakala : 1 buah
  - c. Lapangan sepak bola : 14 lapangan
  - d. Lapangan bola voli : 34 lapangan
  - e. Lapangan bulu tangkis : 22 lapangan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Jekulo Dalam Angka 2021* (Kudus: Gea Graphics Kudus, 2021):7.

### 3. Pemilu 2019 di Kecamatan Jekulo

Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memiliki jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 385 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 80.185 pemilih.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pemilih di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada Pemilu tahun 2019**

<b>Desa (Kelurahan)</b>	<b>TPS (Tempat Pemungutan Suara)</b>	<b>Pemilih</b>
Sadang	22	4.389
Bulung Cangkring	48	9.803
Bulung Kulon	39	8.323
Sidomulyo	11	2.137
Gondoharum	29	5.885
Terban	29	5.970
Pladen	21	4.294
Klaling	32	6.989
Jekulo	35	7.358
Hadipolo	43	9.183
Honggosoco	36	7.222
Tanjungrejo	40	8.632
<b>Kecamatan Jekulo</b>	<b>385</b>	<b>80.185</b>

Wilayah Kecamatan Jekulo memiliki 12 desa dengan pembagian Tempat Pemungutan suara yang berjumlah 385 TPS dan memiliki daftar pemilih yang berjumlah 80.185 pemilih. Dari 12 desa di Kecamatan Jekulo, Desa Bulung Cangkring memiliki jumlah TPS terbanyak yaitu 48 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 9.803 pemilih. Sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Sidomulyo dengan 2.137 pemilih.

**Tabel 4.4**  
**Perolehan suara menurut partai peserta pemilu di**  
**Kecamatan Jekulo pada pemilu tahun 2019**

<b>Partai Peserta Pemilu</b>	<b>DPR</b>	<b>DPRD I</b>	<b>DPRD II</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	6.927	12.856	17.850
Partai Gerakan Indonesia Raya	4.074	6.963	5.158
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.227	6.232	5.482
Partai Golongan Karya	7.660	5.535	9.162
Partai Nasdem	13.433	5.258	5.578
Partai Gerakan Perubahan	748	648	2.632
Partai Berkarya	975	1.498	613
Partai Keadilan Sejahtera	1.987	4.329	5.850
Partai Persatuan Indonesia	1.011	1.140	1.713
Partai Persatuan Pembangunan	2.207	1.762	1.025
Partai Solidaritas Indonesia	960	575	303
Partai Amanat Nasional	2.752	2.605	3.248
Partai Hati Nurani Rakyat	490	509	3.362
Partai Demokrat	1.966	1.947	2.693
Partai Bulan Bintang	179	202	228
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	84	53	36
<b>Kecamatan Jekulo</b>	<b>59.680</b>	<b>52.112</b>	<b>64.933</b>

Hasil perolehan suara pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Jekulo, PKB mampu menduduki suara terbanyak dengan dukungan terbanyak diberikan berasal dari DPRD I sebanyak 12.856 suara dan DPRD II sebanyak 17.850, sedangkan untuk dukungan DPR diperbanyak oleh Partai



Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 14.277 suara.

#### 4. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) teretus setelah berakhirnya Orde Baru, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kebanjiran usulan warga NU dari seluruh tanah air. Ada pula yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik dengan mengusulkan nama partai, lambang partai serta nama pengurusnya. Tercatat sekitar 39 nama untuk nama partai diantaranya yaitu Kebangkitan Umat, Nahdlatul Ummah dan Kebangkitan Nasional. Begitu banyak nama yang diusulkan, PBNU sangat berhati—berhati dalam mengambil keputusan. Sebab warga NU yang gencar untuk pembentukan partai politik sendiri sebenarnya dikarenakan hasil Muktamar ke-27 yang diadakan di Situbondo tahun 1984, hasil muktamar menyatakan NU merupakan organisasi yang tidak bisa melakukan kegiatan politik dan tidak terikat dengan partai politik. Karena dirasakan PBNU tidak mampu menjawab keinginan masyarakat, maka beberapa kelompok NU mulai mengumumkan pembentukan partai politik untuk memenuhi aspirasi rakyat sesuai dengan daerah masing-masing.

Mulailah muncul partai di antaranya berasal dari Cirebon yaitu Partai Kebangkitan Umat dan dari Purwokerto yaitu bernama Partai Bintang Sembilan. Menyikapi hal tersebut, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah yang diadakan pada tanggal 3 Juni 1998, setelah itu dibentuk Tim Lima yang bertugas menyikapi berbagai aspirasi warga NU. Ketua Tim Lima yaitu KH Ma'ruf Amin dengan anggota yaitu KH M Dawam Anwar, Dr. KH Said Aqil Siroj, SM Rozy Munir dan Ahmad Bagdja.<sup>3</sup>

Semakin gencarnya keinginan warga NU tentang pembentukan NU, diadakannya Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada 29 Juni 1998, untuk memperkuat Tim Lima yaitu dibentuklah Tim Asisten. Ketua Tim Asisten yaitu Arifin Djunaedi yaitu wakil Sekjen PBNU dengan mengemban tugas untuk membantu Tim Lima.<sup>4</sup> Untuk membagi tugas

---

<sup>3</sup> Ekawati, "Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009.", *Jurnal Pointer : Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, Vol.2, No.1, (2016): 51.

<sup>4</sup> S Nuryanti, "Masa Depan Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb)," *Academia.Edu* (2004): 14, [https://www.academia.edu/download/48878598/Bab\\_3\\_Masa\\_Depan\\_PKB.pdf](https://www.academia.edu/download/48878598/Bab_3_Masa_Depan_PKB.pdf).

masing-masing tim, pada tanggal 22 Juni 1998 kedua tim tersebut melakukan rapat. Selanjutnya, diantara tanggal 26-28 Juni 1998, kedua tim tersebut melakukan rapat keduanya untuk penyusunan rancangan awal pembentukan partai politik.

Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid, merasa prihatin dengan keinginan beberapa kelompok NU untuk mendirikan partai politik NU, yang tampaknya menghubungkan agama dan partai politik. Oleh karena itu, Gus Dur setuju untuk mendirikan partai politik berbasis ahlussunah wal jemaah. Dukungan untuk ide ini diperkuat oleh deklarator lainnya, seperti KH A Mustofa Bisri, KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat dan KH A. Muchith Muzadi. Setelah pembentukan partai dan pemilihan nama, deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilakukan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998. PKB dipilih karena mampu mencerminkan nilai-nilai yang diusung partai tersebut, yaitu perjuangan, nasionalisme, keterbukaan dan demokratis.<sup>5</sup>

#### 5. Visi dan misi PKB

Visi Partai PKB sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Misi Partai PKB sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- b. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- c. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

---

<sup>5</sup> Ekawati, "Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009.", *Jurna Pointer : Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, Vol.2, No.1, (2016), 52.



- d. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- e. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Tujuan partai PKB adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, material, dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional dan demokratis, terbuka, bersih dan berahlakulkarimah.

Sedangkan untuk mencapai tujuannya, partai kebangkitan bangsa melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Bidang Agama  
Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Bidang Politik  
Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membela kedaulatan rakyat, mendirikan pemerintahan yang demokratis, bersih dan amanah, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri kemerdekaan, dinamisme dan pembangunan. bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan merata.
- c. Bidang Ekonomi  
Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

---

<sup>6</sup> Dokumen DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus.

## d. Bidang Hukum

Berusaha untuk memelihara dan mengembangkan supremasi hukum yang beradab, mampu melindungi setiap orang, menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

## e. Bidang Sosial dan Budaya

Berusaha membangun kebudayaan yang maju dan modern, dengan tetap menjaga jati diri bangsa yang baik guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa

## f. Bidang Pendidikan

Berusaha Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia, trampil, profesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial disekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

## g. Bidang Pertahanan

Menyadarkan seluruh warga negara akan kewajibannya untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara, mendorong terlaksananya hak masyarakat untuk membela diri terhadap perlakuan yang menimbulkan rasa aman, baik pada pihak individu maupun institusi masyarakat tertentu.

## 6. Struktur pengurus PKB

### SUSUNAN PENGURUS DEWAN SYURO DPC PKB KUDUS<sup>7</sup>

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	K.H. Muhamad Jazuli, S.Ag., M.H.	PONPES
2.	Wakil Ketua	H. Wiyono, S.H.	TOMASY
3.	Wakil Ketua	K.H. Muhammad Asnawi Hafid	PONPES
4.	Wakil Ketua	KH. Mujahid Dahlan	PONPES
5.	Wakil Ketua	KH Jamiin Bahauddin	PONPES
6.	Wakil Ketua	Gus Khidhir	PONPES
7.	Wakil Ketua	K.H. Fajar Nugroho	PONPES
8.	Wakil Ketua	Dra. Hj. Noor Aini	TOMASY
9.	Wakil Ketua	Hj. Sukaesi	TOMASY
10.	Wakil Ketua	Hj. Nurul Isnaini	TOMASY
11.	Sekretaris	Drs. H. Ilwani	FRAKSI

<sup>7</sup> Dokumen DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus

12.	Wakil Sekertaris	H. Sutejo, S.Pd.I.	FRAKSI
13.	Wakil Sekertaris	H. Sunarto, SH.,M.H	MANTAN FRAKSI
14.	Wakil Sekertaris	Ali Imron, S.Ag. M.Pd	PCNU
15.	Wakil Sekertaris	Ust. Noor Hadi, S.Pd.I.,M.Pd.I	FKDT
16.	Wakil Sekertaris	Ust. Rif'an, S.Pd.I. M.Pd	BADKO TPQ
17.	Wakil Sekertaris	Hj. Masroh, S.Pd	PENGUSAHA
18.	Anggota	K.H. Abdul Wahid	TOMASY
19.	Anggota	K.H. Sinong Muhsin	PCNU
20.	Anggota	K.H. Ahmad Sudardi, S.Pd.I.	PERGUNU
21.	Anggota	K. Khasani, S.Ag.	TOMASY
22.	Anggota	Ust. Syufa'at, S.Pd.I.	FKDT
23.	Anggota	Ust. Muhammad Idris, S.Ag.	BADKO TPQ
24.	Anggota	Hj. Rufi'ah	MUBALIGHOH
25.	Anggota	Hj. Maslikah	MUSLIMAT
26.	Anggota	Hj. Juwariyah	MUSLIMAT
27.	Anggota	Hj. Zahroh	MUSLIMAT

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN TANFIDZ DPC PKB KUDUS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Ketua	H. Mukhasiron, S.Ag	FRAKSI
2.	Wakil Ketua	K. Chirzil A'Ia, S.Pd.I.	PONPES
3.	Wakil Ketua	H. Ali Ihsan, S.Ag.,M.H.	FRAKSI
4.	Wakil Ketua	Amin Hidayat,M.Pd	AKTIVIS
5.	Wakil Ketua	Saefudin, S.Pd.I.,M.Pd.	RMI
6.	Wakil Ketua	Ahmad Nor Qodin, S.H.I M.H.	ADVOKAT
7.	Wakil Ketua	Agus Aji Satrio, S.E.	EXs KPU
8.	Wakil Ketua	Dwi Syaifullah, S.Pd.I	ANSOR
9.	Wakil Ketua	Hj. Mawar Anggraini, S.Sn.	ISTRI BUPATI
10.	Wakil Ketua	Hj. Noor Hidayah, S.Ag.	FATAYAT
11.	Wakil Ketua	Hj Nafis Sholihah, S.Ag	FATAYAT
12.	Wakil Ketua	Hj. Umi Khulsum	MUSLIMAT
13.	Sekretaris	Dr. H. Noor Hadi, S.H. MH	FRAKSI
14.	Wakil	Muh Safi'I, S.Pd	AKTIVIS

	Sekretaris		
15.	Wakil Sekretaris	H. M. Abdul Bashir, S.H.I.	DPC
16.	Wakil Sekretaris	H. Ahmad Khairil Badawi, S.Pd.	FRAKSI
17.	Wakil Sekretaris	Abu Hasan Asyari, S I P	IPNU
18.	Wakil Sekretaris	Mukhlis, M.Pd.	PERGUNU
19.	Wakil Sekretaris	Khifni Nasif. M.E	RMI
20.	Wakil Sekretaris	Arif Musta'in, M.Pd	ANSOR
21.	Wakil Sekretaris	Moh. Syakuri, S.I.P	ANSOR
22.	Wakil Sekretaris	Jumanto	BANSER
23.	Wakil Sekretaris	Rahmat Hidayat, S.Pd	AKTIVIS
24.	Wakil Sekretaris	Hj Lu'luul Maknun, S.Pd.	FATAYAT
25.	Bendahara	Suparno, S.H.I., M.H.	ANSOR
26.	Wakil Bendahara	M. Fuad Amrullah, S.E.	PCNU
27.	Wakil Bendahara	Eka Kharisma Akbar, S.E.	PENGUSAHA
28.	Wakil Bendahara	Noor Aji Yusuf, S.Pd.	PENGUSAHA
29.	Wakil Bendahara	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	FRAKSI
30.	Wakil Bendahara	Khuriyah, S.Ag, S.Pd.	PERGUNU

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Strategi PKB dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kecamatan Jekulo**

Partai politik membutuhkan strategi untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam pemilu. Sesuai dengan pernyataan Drs. H. Ilwani, *“PKB disini cukup dikenal masyarakatnya, itu semua karena strategi PKB untuk meraih kepercayaan masyarakat. Kalau bisa mempermudah*

*masyarakatnya biar masyarakat juga bisa berempati dengan PKB, bisa lewat pendekatan langsung oleh masyarakat seperti membaur langsung dengan masyarakatnya atau mempermudah urusan masyarakatnya jika masyarakat membutuhkan sesuatu. Pokoknya kita siap untuk masyarakat, masyarakat juga pasti punya simpati dengan kita nantinya.”<sup>8</sup>*

PKB merupakan partai yang cukup memiliki nama di Jekulo, masyarakat mengenal PKB karena kepercayaan masyarakat dari program program PKB di Jekulo terutama dibidang keagamaan seperti bantuan pembangunan mushola atau pondok serta adanya santunan untuk anak yatim dan beberapa bantuan umum lainnya. Bantuan yang dicanangkan oleh PKB merupakan strategi partai untuk tetap eksis dan dikenal masyarakat di Jekulo. Strategi yang dilakukan PKB di Jekulo dalam memenangkan Pemilu Legislatif di Kudus tahun 2019 :

a. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi PKB di Jekulo sendiri menggunakan strategi sosialisasi dan pendekatan secara langsung sesuai dengan instruksi DPD Cak Imin, dalam wawancara dengan Na'im selaku Staf DPC PKB Kabupaten Kudus mengatakan bahwa,

*“Untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, dari PKB sendiri menyesuaikan apa yang sudah ditentukan dari atas sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Ketua umum PKB, Cak Imin yang mengatakan untuk melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat yaitu melalui sosialisasi atau pendekatan langsung seperti terjun di actionnya bisa melalui pendekatan melalui bantuan ketika ada daerah mengalami bencana alam atau sesuai konstitusi seperti peraturan mengenai adanya bantuan gaji untuk guru madrasah. Pendekatan bisa dilakukan dengan sesuai porsinya.”<sup>9</sup>*

Pendekatan secara aksi langsung dari kader PKB kepada masyarakat mampu meraih simpati besar dari masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat juga dengan pernyataan dari salah satu masyarakat di Kecamatan Jekula yang juga merupakan

---

<sup>8</sup> Drs. Ilwani, wawancara penulis, dilakukan tanggal 27 Mei 2023 wawancara ke 10

<sup>9</sup> Na'im, wawancara penulis, dilakukan tanggal 28 Maret 2023, wawancara ke-3

aktivis di Kecamatan Jekulo yaitu Agus Rianto selaku Ketua Ansor di Kecamatan Jekulo,

*“Nama PKB sendiri itu cukup dikenal oleh masyarakat disini, untuk bantuan yang diberikan dari PKB pun kalau bisa dikatakan loyal ? Seperti bantuan rutin untuk yatim piatu, pembangunan madrasah sama pemberian gaji kepada guru madrasah juga ada. Bantuan itu semua berasal dari usulan rakyat yang dijembutani oleh para kader, kebetulan disini kan ada pak Ilwani yang dari PKB yang sekarang menjadi DPR.”<sup>10</sup>*

Loyalitas PKB mampu membawa banyak dukungan dari masyarakat Jekulo. Sikap terbuka kader PKB mampu menjadi alasan kuat masyarakat untuk memilih PKB. Ketika partai mampu menjalankan apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat pun ikut memberikan suaranya kepada PKB. PKB yang ada di Jekulo mampu menjadi jembatan untuk membangun Kecamatan Jekulo dari usulan masyarakat. Drs. H. Ilwani sebagai ketua DPC PKB Kudus periode 2013-2020 dan DPR Kudus 2019-2024 dalam wawancara mengatakan,

*“Disini kan ada reses mbak, yang menjadi bentuk sosialnya, biasanya ada notulensinya sebagai pencatat hasil suara-suara masyarakat. Selain itu juga mereka kadang datang langsung ke rumah saya kadang membawa proposal, atau meminta bantuan misal keluarganya lagi sakit harus ke rumah sakit ya saya langsung bantu. Intinya itu, apa yang masyarakat mau ya kita bantu sabisanya.”<sup>11</sup>*

Bentuk sosial PKB secara umum diadakannya reses, bentuk reses sendiri biasanya berdiskusi yang tentunya didatangi oleh kader PKB dan masyarakat untuk mengusulkan program kerja atau bantuan yang dibuthkan masyarakat kepada PKB sebagai jembatan untuk mengusulkan bantuan tersebut kepada pusat agar mendapatkan anggaran dana. Selain itu untuk meraih kepercayaan masyarakat, kader juga harus mampu

---

<sup>10</sup> Rianto, Agus, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2023, wawancara ke-2

<sup>11</sup> Drs. Ilwani, wawancara penulis, dilakukan tanggal 27 Mei 2023 wawancara ke 10



terbuka dan ringan membantu masyarakat ketika membutuhkan bantuan.

DPRD sebagai dewan perwakilan masyarakat maka seharusnya mampu mendengar aspirasi masyarakat. Salah satu agenda dari fraksi PKB untuk menampung aspirasi masyarakat adalah dengan adanya Reses. Agenda reses juga dilakukan oleh PKB di Jekulo sebagai harapan mampu menampung aspirasi masyarakat Jekulo.

Selain komunikasi partai ke masyarakat, komunikasi dari dalam partai juga sangat diperlukan. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik dari dalam, maka dibutuhkannya komunikasi dari dalam yang baik juga. Keharmonisan dari dalam partai itu sendiri juga diperlukan. PKB biasanya menyelesaikan segalanya dengan mufakat sehingga tidak menimbulkan konflik dalam yang berkelanjutan,

*“Biasanya ada rapat internal seperti memutuskan apa bantuan yang didahulukan. Kan masukan masyarakat banyak, sedangkan proposal untuk masuk kepusat sana nggak langsung ditanda tangani semuanya, jadi harus dipertimbangkan melalui rapat”<sup>12</sup>*

Selain komunikasi ke luar dengan dekat langsung dengan masyarakat, ternyata komunikasi dari dalam juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan partai. Keharmonisan dari dalam partai juga diperlukan untuk menarik kepercayaan masyarakat. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan keputusan dengan mufakat menjadi kunci agar hubungan antar anggota tetap terjaga.

---

<sup>12</sup> Rahmat, wawancara penulis, dilakukan tanggal 5 Mei 2023 wawancara ke 7

**Gambar 4.1 Rapat Perda Pesantren, Madin dan Madrasah**



Sumber : Media Facebook DPC PKB Kudus

Rapat Perda Pesantren, Madin dan Madrasah yang diadakan oleh PKB dengan mendatangkan seluruh pengurus Fraksi PKB dengan tujuan untuk menentukan keputusan yang tepat, sebelumnya atas dasar masukan dari masyarakat. Keputusan-keputusan mempertimbangkan segala kebutuhan yang diperlukan seperti bagaimana dengan fasilitas-fasilitas untuk pondok pesantren, kesejahteraan tenaga pendidik pondok pesantren, madrasah maupun madin.

**Gambar 4.2 Santunan Yatim Piatu PKB**



Sumber : Media Facebook DPC PKB Kudus

Santunan yatim piatu yang diselenggarakan oleh PKB terkhusus di Kecamatan Jekulo diadakan secara rutin namun dilakukan di setiap bulannya di desa-desa Jekulo berbeda-beda

dan berkala. Program santunan anak yatim piatu masih diadakan hingga sekarang dan merupakan program yang cukup membantu masyarakat di Kecamatan Jekulo.

**Gambar 4.3 Reses PKB**



Sumber : DPC PKB Kudus

Rapat Reses dilakukan rutin setiap bulan yang mengundang seluruh jaringan masyarakat, dengan tujuan untuk PKB agar dapat mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Selain masyarakat, kader dari Fraksi PKB juga ikut serta dalam rapat reses sebagai bentuk komunikasi langsung dari masyarakat kepada PKB.

b. Strategi Kaderisasi

Seleksi mengenai perekrutan kader-kader baru tidak memiliki syarat tertentu, PKB memiliki sikap terbuka kepada siapapun yang ingin menjadi kader baru di PKB. Hasil penelitian didapat informasi dari Na'im selaku staf DPC PKB mengatakan,

*“Tidak ada kriteria tertentu untuk kader baru. Karena PKB itu terbuka kepada siapapun yang mau bergabung dengan PKB, dia mau putih, dia mau hitam, dia mau tinggi, dia mau pendek semua kita terima, dalam hal dia bodoh, dia pintar kita tidak membatasi itu. Kader baru semua akan dimulai dari nol, karena kita meregenerasi dari generasi milenial semua akan belajar dan bertahap*

*naik dari dia akan menjadi PAC akan naik jadi pengurus.”<sup>13</sup>*

Perekrutan secara terbuka oleh PKB mampu menjadi kekuatan untuk PKB karena adanya keterbukaan tersebut artinya PKB tidak memihak manapun sehingga aspirasi masyarakat yang beragam pun mampu diterima. Di Jekulo sendiri jika dilihat dari pemilu 2019 mampu mendulang suara terbanyak untuk PKB, meskipun memang PKB lebih dikenal besar dari rahim NU akan tetapi organisasi masyarakat di bawah NU seperti Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU dan IPPNU tidak bisa dikatakan akan terjun ke PKB semua.

*“Tidak semua elemen dari NU ke PKB, seperti didalam Ansor sendiri anggotanya ada yang di PKB ada di partai lain juga ada. Jadi kalau urusan PKB dan NU tentunya beda, NU itu NU kalau PKB sudah masuk ke ranah politik ya politik.”<sup>14</sup>*

Artinya, meski PKB besar di bawah NU masih saja bagaimana ideologi setiap pribadi memiliki ketertarikan sendiri-sendiri di masyarakat,

*“Kalau dari IPNU sendiri ya mbak, itu kurang terlihat malah tentang politik mereka. Mereka ikut IPNU ya memang untuk berorganisasi dengan nawaitu berjuang atas nama NU bukan untuk politik.”<sup>15</sup>*

Zaenuri selaku Ketua IPNU Kecamatan Jekulo juga mengungkapkan bahwa para remaja yang ikut IPNU bukan untuk urusan politik melainkan mengabdikan diri ke dalam organisasi masyarakat dibawah nama NU.

Dijelaskan juga bahwa perekrutan atau pengkaderan memiliki fungsi yang sangat utama untuk membangun partai lebih maju. Pengibaratanya seperti menanam, artinya adalah bagaimana partai mampu melahirkan kader-kader berpotensi dengan mencari bibit unggul. Untuk mendapatkan kader yang

---

<sup>13</sup> Na'im, wawancara penulis, dilakukan tanggal 28 Maret 2023, wawancara ke-3

<sup>14</sup> Rianto, Agus, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2023, wawancara ke-2

<sup>15</sup> Zaenuri, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 14 April 2023, wawancara ke-4

unggul maka dengan membentuk kader yang berkredibilitas dengan kaderisasi, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ilwani selaku sekretaris pengurus dewan Syuro DPC PKB Kudus,

*“Pengkaderan di PKB saat ini sudah tersistem, seperti dalam pasal 98 AD/ART, sistem kaderisasi PKB saat ini dibangun secara terstruktur.”<sup>16</sup>*

Artinya dalam pengkaderan PKB memiliki aturan dan sistem yang terikat dalam pengkaderan. Perekrutan anggota yang melalui sistem kaderisasi menjadi persyaratan mutlak untuk seluruh pengurus dan anggota bagi yang ingin mendapat promosi jabatan strategis baik dalam kepengurusan internal partai maupun pemerintahan. Kaderisasi PKB memiliki tahapan-tahapan dalam membentuk kader yang terakriditas, seperti dengan informasi melalui wawancara penunilis dengan staf PKB Na'im, yaitu

*“Dalam pengkaderan memiliki step by step untuk melahirkan kader yang baik yaitu di tahap awal seperti memahami organisasi PKB, menumbuhkan loyalitas terhadap partai PKB dan meningkatkan pengabdian kepada partai PKB, dengan tujuan untuk mengangkat kualitaskepengurusan PKB, memperoleh wawasan tentang partai serta mampu mengembangkan ide untuk membangun PKB, dan terakhir, mengajarkan cara berpikir ke depan, mengembangkan sumber daya manusia organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, dengan tujuan mampu menganalisis peristiwa.”<sup>17</sup>*

Proses pengkaderan PKB memiliki tujuan untuk melatih kader-kader agar lebih mengenal partai, loyal kepada partai dan berdedikasi mengabdikan kepada partai dengan mengabdikan diri kepada masyarakat. Langkah pertama yaitu memahami PKB. Kader harus mampu memahami dengan jelas struktur tujuan dan nilai-nilai partai. Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan loyalitas partai, ini melibatkan pembinaan

---

<sup>16</sup> Drs. Ilwani, wawancara penulis, dilakukan tanggal 27 Mei 2023 wawancara ke 10

<sup>17</sup> Na'im, wawancara penulis, dilakukan tanggal 28 Maret 2023, wawancara ke-3



komitmen dan dedikasi terhadap partai dan tujuannya. Tahap ketiga adalah meningkatkan pengabdian kepada partai, hal ini berhubungan dengan peningkatan keterlibatan aktif dalam kegiatan partai dan upaya untuk mencapai tujuan partai. tahap keempat adalah meningkatkan kualitas pengurus partai, tentunya berhubungan dengan pengembangan ketrampilan dan kemampuan pengurus partai termasuk kemampuan analitis dan konseptual. Terakhir adalah mempelajari cara mengembangkan sumber daya manusia organisasi, terlibat langsung dengan pengembangan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun strategi untuk masa depan.

**Gambar 4.4 Kaderisasi PKB**



Sumber : DPC PKB Kudus

c. Strategi sayap politik

Partai politik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tentu tidak dapat melakukan sendiri, pastinya dibutuhkan organisasi lain yang dibawah langsung oleh partai politik itu sendiri. Hasil wawancara Na'im staf PKB Kabupaten Kudus

*“Sebagai bentuk terjun langsung ke masyarakat tentunya partai membutuhkan organisasi lain yang mampu lebih dekat dengan masyarakat, begitu juga PKB.”<sup>18</sup>*

Terkait sayap partai politik PKB di Kudus memiliki beberapa organisasi yang dibawahnya seperti Garda Bangsa (Gerakan Pemuda Bangsa), Gemasaba (Gerakana Mahasiswa Satu Bangsa), Perempuan Bangsa, Gerbang Tani, DPC Garda BMI Kabupaten Kudus, DPC Garda Santri Kabupaten Kudus, dan KGB (Koordinasi Garda Bangsa).

---

<sup>18</sup> Na'im, wawancara penulis, dilakukan tanggal 28 Maret 2023, wawancara ke-3



Sebagai perwakilan perempuan, Perempuan Bangsa merupakan wadah untuk perempuan dalam berpolitik. Dalam politik sendiri kebanyakan laki-lakilah yang mendominasi, maka dibutuhkanlah wadah untuk berpolitik, Murdiati selaku Ketua Fatayat di Kecamatan Jekulo mengatakan,

*“Di Jekulo ada mbak Perempuan Bangsa dan kebetulan saya pernah menjabat sebagai ketua ketika pertama perempuan bangsa ada di Kudus. Waktu itu pertama kalinya belum terlalu aktif ya mbak, istilahnya masih penyesuaian.”*<sup>19</sup>

Artinya adalah aspirasi masyarakat yang diserap oleh PKB bahkan tidak memandang gender. Perempuan pun memiliki wadah untuk menyampaikan suaranya. Strategi PKB dalam meraih suara yaitu dengan mendengar aspirasi masyarakat dengan baik, dengan memberikan wadah untuk masyarakat seperti garda bangsa, perempuan bangsa diharapkan masyarakat mampu mengaspirasikan suaranya dengan mudah.

Selain dari Garda Bangsa dan Perempuan Bangsa, ternyata untuk mahasiswa juga mendapatkan wadah dari PKB untuk mengeluarkan aspirasi, terlebih mahasiswa biasanya motivasinya berapi-api untuk membela keadilan. Di Jekulo sendiri juga memiliki wadah untuk anak-anak muda untuk bersuara dalam membangun kecamatan Jekulo. Namun seiring berjalannya waktu eksistensi Germasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) kurang terlihat karena kesibukan mereka sendiri-sendiri. Sesuai dengan informasi yang didapat dari informan yaitu Fendi yang mengatakan bahwa,

*“Sebenarnya kalau untuk anak muda kan ada wadahnya terutama untuk mahasiswa, kalau di dunia perkuliahan mereka memang aktif namun untuk di wilayah seperti kecamatan atau desa itu lebih organisasi masyarakatnya yang aktif seperti IPNU, IPPNU, Anshor, Fatayat dan Muslimat. Mungkin untuk mahasiswa ya aktifnya di bangku kuliah saja.”*<sup>20</sup>

Germasaba untuk kelompok mahasiswa di Jekulo kurang aktif karena cenderung mahasiswa lebih aktif di kampus mereka. Dibanding dengan ketiganya, ada Garda Tani yang

---

<sup>19</sup> Murdiati, wawancara penulis pada tanggal 1 Mei 2023, wawancara ke-5

<sup>20</sup> Fendi, wawancara penulis pada tanggal 29 Mei, wawancara ke-11

masih sangat baru ditelinga masyarakat. Banyak program yang diusulkan masyarakat, namun masih belum dijalankan sehingga kepercayaan masyarakat.

**Gambar 4.5 Konsolidasi dan Koordinasi Perempuan Bangsa**



Sumber : Media Facebook DPC PKB Kudus

**Gambar 4.6 Kegiatan Garda Bangsa**



Sumber : Dokumentasi DPC PKB Kudus

## 2. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah bagaimana seseorang memilih pilihan yang menurutnya paling baik atau paling tepat. Ada beberapa daerah dan teritori yang terbentuk dari masyarakat yang berdasarkan sistem kekerabatan dan pergaulan berdasarkan keturunan. Orang yang menjadi pemimpin masyarakat berasal dari keluarga atau kerabat asli dari orang yang dianggap berhasil dalam status sosial ekonomi atau berhasil karena karakternya. Akibatnya, warga sering mengandalkan diri mereka sendiri dan bagaimana

perasaan mereka tentang tokoh atau tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan dominasi tokoh yang tanggung jawabnya meliputi mempengaruhi sikap dan perilaku serta orientasi warga negara. Moden adalah orang pertama di desa yang berurusan langsung dengan masyarakat umum. Moden di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo mengatakan,

*“Disini peran tokoh kuat sekali mbak, kyai bilang apa jamaahnya langsung ikut semua. Jadi kalau peran tokoh cukup kuat, tapi tergantung juga. Paling kuat dipengaruhi ya ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Untuk anak-anak mudanya itu mereka mempunyai pemikiran sendiri.”<sup>21</sup>*

Menurut Miriam Budiarjo secara konsep, partisipasi politik adalah tindakan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*) secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan maupun pemilu. Tindakan tersebut bisa berupa menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemilihan pemimpin dan parlemennya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, maka peran masyarakat adalah memilih atau bisa dikatakan menjadi pemilih. Firmanzah mengeklaim pemilih biasanya dianggap sebagai anggota dari semua partai politik, dan tujuan untuk para kader adalah untuk mempengaruhi dan membujuk mereka untuk mendukung kemudian memilih kader yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemilih dapat berupa konstituen atau anggota masyarakat umum yang percaya bahwa ideologi tertentu tercermin dalam organisasi politik seperti partai politik. Artinya pemilih biasanya memilih suatu partai karena adanya kesamaan ideologi ataupun sejalan dengan visi misi partai.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rif’ani, wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2023, wawancara ke-1

<sup>22</sup> Sahran Raden, Intam Kurnia, and Randi Atma R. Massi, *Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah)*, 2020: 87.

Perilaku pemilih secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan yaitu pendekatan Sosiologi, Psikologi dan Rasional.<sup>23</sup>

a) Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi merupakan model pemilih yang menjatuhkan pilihannya atas dasar kesamaan berdasarkan faktor lingkungan seperti tempat tinggal, afliasi etnik, keluarga, tradisi, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, sosial ekonomi dan lain-lain. Agama, keluarga, keanggotaan organisasi, faktor usia, geografis, pendidikan mampu menjadi faktor terkuat dalam mempengaruhi pemilih.

Faktor agama menjadi alasan kuat pemilih di Jekulo dalam memilih PKB pada Pemilu 2019. Seperti yang dikatakan salah satu informan melalui wawancara oleh peneliti,

*“Untuk masyarakat yang memilih PKB yang saya lihat-lihat ya karena unsur kyai kuat sekali disini, terutama para orang tua disini yang ikut jam’iyah. Kyainya bilang A ya ikut A, B ya B, pemikiran mereka gini bahwa oh wong Kyai milih itu, pasti benar nantinya. Jadi kaya udah terdoktrin sendiri atau mudah dipengaruhi, tapi ini untuk usia tua ya, kalau yang masih muda pasti beda lagi, mereka lebih modern pemikirannya.”<sup>24</sup>*

Selain itu juga terdapat tokoh kuat yaitu adanya perwakilan masyarakat Jekulo yang mampu menduduki kursi DPRD dari fraksi PKB yaitu H. Mukhasiron, S.Ag, Drs. H. Ilwani, H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd. Melalui wawancara masyarakat umum yaitu bapak Udin menyatakan bahwa pengaruh tokoh memang memiliki pengaruh besar untuk pemilih,

*“Saya kalau boleh jujur, sebenarnya memilih PKB dari hati karena saya memang penggemar berat Gusdur. Selain yang saya ketahui adanya wakil-wakil masyarakat disini seperti mas Badawi, pak Ilwani dan pak Mukhasiron.”<sup>25</sup>*

---

<sup>23</sup> Muhadam and Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, vol. 1, (2015): 14.

<sup>24</sup> Ahmad Rif’ani, wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2023, wawancara ke-1

<sup>25</sup> Zainudin, wawancara penulis pada tanggal 24 Mei 2023, wawancara ke-10

Adanya peran sejarah dimana sesosok Gusdur merupakan tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan PKB. Gusdur selain sebagai salah satu berdirinya PKB namun juga sebagai pemimpin pertama PKB yang mampu membawa Gusdur menjadi Presiden Indonesia pada saat itu. Selain nama besar Gusdur berada di PKB namun juga sangat berpengaruh dalam NU karena Gusdur merupakan guru besar NU yang merupakan cucu dari K.H. Hasyim Asyari yang merupakan pendiri NU yang ikut serta dalam melawan penjajah.<sup>26</sup>

Selain adanya peran tokoh sejarah besar PKB yaitu guru besar Gusdur, adapun tokoh agama yang memiliki pengaruh dan menjadi kader langsung PKB di Kecamatan Jekulo, seperti K.H. Ilwani, H. Mukhasiron yang saat ini menjabat sebagai wakil DPRD Kabupaten Kudus dan H. Badawi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus. Hal tersebut diperjelas kembali oleh Agus Rianto selaku salah satu masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ansor

*“Wah PKB disini memang besar, terlebih dalam Pemilu 2019 kemarin PKB mendapatkan kursi dan itu ada dari Jekulo sendiri seperti Pak Mukhasiron sama Mas Badawi itu. Jadi saya yakin, masyarakat lebih percaya terhadap PKB dan pastinya memberi dukungan besar untuk PKB.”<sup>27</sup>*

Artinya adalah, peran Kyai sangat penting di Jekulo dalam mempengaruhi pemilih. Mereka percaya akan sesosok Kyai sebagai guru spiritual agama Islam mampu memberikan keputusan yang benar dalam memilih kandidat. Pada rentang usia diatas dewasa sangat mudah terpengaruh, dan usia muda lebih memiliki pemilihannya sendiri dalam memilih. Pernyataan mengenai hal tersebut juga di dukung melalui wawancara berikut yaitu,

*“Kalau muslimat itu lebih ikut-ikut saja, bu Nyai bilang apa ya jamaahnya ikut. Beda sama fatayat, suara fatayat*

---

<sup>26</sup> Supriyadi, “Peran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2008): 46.

<sup>27</sup> Rianto, Agus, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2023, wawancara ke-2



*lebih terpecah, ada yang ikut partai A, ada yang jadi kader partai juga ada*<sup>28</sup>

Usia juga mempengaruhi pemilih, untuk usia lanjut biasanya lebih mudah dipengaruhi dan menaruh kepercayaan besar kepada sosok yang dianggapnya lebih terpercaya. Sedangkan usia remaja dan dewasa cenderung lebih bisa berfikir dan memilih sesuai dengan pilihannya sendiri.

*“Kalau disini PKB memang dikenal warga karena dari calonnya sendiri, kan Jekulo hampir kebanyakan ada pondok pesantren di tambah dari PKB banyak membantu madrasah, jadi dari situ simpati saya. Karena adanya dukungan penuh dari PKB untuk membangun Kecamatan Jekulo terutama di bidang guru madrasah dan sekolah madrasah.”*<sup>29</sup>

Unsur pendidikan juga mempengaruhi, dari bagaimana kader PKB mampu mensejahterakan pendidik agama dan membangun infrakstruktur madrasah menjadi daya tarik simpati sendiri untuk masyarakat memilih PKB. Pendidikan agama Islam di Jekulo cukup kuat peminatnya sehingga banyak berdiri pondok pesantren dan madrasah banyak berdiri di Jekulo. Maka tak ayal bahwasannya PKB mampu mendapatkan suara terbanyak dari Jekulo karena kebanyakan bantuan yang disalurkan untuk kesejahteraan guru madrasah dan pembangunan madrasah.

Keluarga juga mampu menjadi pengaruh pemilih dimana, lingkungan keluarga merupakan lingkungan cukup mudah jangkauan komunikasinya, umunya untuk pemilih yang awam akan pemilihan atau lebih apatis dia biasanya lebih ikut keluarga, seperti hasil wawancara dari informan yaitu Rasti merupakan warga Desa Hadipolo yang mengatakan,

*“Sebenarnya saya tidak terlalu ingin dalam berpartisipasi dalam pemilihan maupun pemilu, namun dari ibu sama bapak mengarahkan siapa yang harus dipilih, jadi yah saya pilih itu.”*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Murdiati, wawancara penulis pada tanggal 1 Mei 2023, waawancara ke-5

<sup>29</sup> Rianto, Agus, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2023, wawancara ke-2

<sup>30</sup> Rasti, wawancara penulis pada tanggal 3 Mei 2023, waawancara ke-6



Dari kalimat tersebut diartikan bahwa pemilih hanya ikut dengan alur orang tua karena mereka tidak peduli dengan bagaimana isu politik atau mungkin mereka cenderung tidak tahu dengan berkembangnya politik sehingga hanya mengikuti apa yang telah diarahkan oleh orang tua mereka. Selain keluarga, ada juga geografis yang mempengaruhi masyarakat Jekulo. Melalui data wawancara, peneliti mendapatkan informasi dari informan yaitu Zainudin,

*“Di Jekulo sini PKB besar karena dari wilayah sendiri, di wilayah Jekulo karena adanya kader yang maju di kursi parlemen jadi cenderung lebih percaya kepada PKB. Disini ada Jekulo yang calonnya juga dari Jekulo begitu juga kadernya, ada Pak Ilwani, Mas Badawi, Pak Jazuli, jadi karena ada empati satu desa sendiri jadi memilih PKB karena dari kewilayahan, wong warganya sendiri kok nggak dipilih.”<sup>31</sup>*

Adanya kesamaan wilayah juga mampu menjadi alasan seseorang memilih, adapun kandidat dari PKB yang cukup dikenal di masyarakat Jekulo seperti H. Ahmad Khairil Badawi, S.Pd., K.H. Muhamad Jazuli, S.Ag., M.H., H. Mukhasiron, S.Ag dan Drs. H. Ilwani. Nama-nama tersebut cukup dikenal masyarakat bukan hanya dari kader PKB melainkan juga orang yang berpengaruh di Jekulo.

Yang artinya pemilih lebih apatis akan isu politik dan lebih mempercayakan dengan pilihan kepercayaan tokoh, kesamaan wilayah, dan ikut-ikutan keluarga. Alasan yang dilatarbelakangi oleh persepsi-persepsi tidak penting untuk mengikuti informasi politik yang berkembang.

#### b) Pendekatan Psikologi

Pendekatan Psikologi merupakan adanya kecenderungan tertentu, biasanya ada faktor ketertarikan masyarakat terhadap memilih kandidat pemilu. Kecenderungan tersebut bisa saja karena adanya ketertarikan pemilih terhadap kandidat karena alasan tertentu seperti unsur keluarga, karisma kandidat, atau pemilih memutuskan pilihannya pada konteks ketokohan yang kuat yang dianggap mampu.

Pemilih dengan pemikiran psikologis juga bisa dicirikan kepada pemilih yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan pengalamannya terutama kepada tokoh yang sudah pernah

---

<sup>31</sup> Zainudin, wawancara penulis pada tanggal 24 Mei 2023, wawancara ke-8

menjabat. Pemilih lebih mempercayakan bagaimana karisma kandidat yang mencalonkan kembali karena alasan percaya. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari informan dari wawancara bahwasannya,

*“Saya memilih karena saya percaya mbak, sebelumnya kan Pak Ilwani sudah mencalonkan dan beliau mampu menjadi wakil rakyat yang amanah jadi saya jatuhkan pilihannya saya kepada beliau dan PKB.”*

Karena tingkat percaya masyarakat terhadap sesosok Drs. H. Ilwani, yang sebelum pada pemilu 2014 terpilih dan beliau mampu menjaga imagenya yang bisa dipercaya masyarakat melalui keloyalitasnya sehingga mampu menarik simpati pemilih untuk memilihnya. Sesuai dengan wawancara kepada Drs. H. Ilwani sebagai berikut,

*“Disini kan ada reses mbak, yang menjadi bentuk sosialnya, biasanya ada notulensinya sebagai pencatat hasil suara-suara masyarakat. Selain itu juga mereka kadang datang langsung ke rumah saya kadang membawa proposal, atau meminta bantuan misal keluarganya lagi sakit harus ke rumah sakit ya saya langsung bantu. Intinya itu, apa yang masyarakat mau ya kita bantu sabisanya.”<sup>32</sup>*

Dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tokoh juga sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih. Bagaimana kebaikan kader mampu menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada pilihannya terhadap kandidat tersebut.

Besarnya nama PKB di Jekulo sendiri memang karena adanya pengaruh besar dari para kader yang cukup dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Jekulo. Selain itu program yang dicanangkan pun bukan hanya omong kosong belaka, melainkan memang dijalankan, seperti adanya bantuan bedah rumah, pembangunan madrasah, santunan anak yatim piatu dan lain-lainnya. Seperti pada wawancara kepada salah satu warga di Jekulo yaitu Ibu Murdiati,

---

<sup>32</sup> Drs. Ilwani, wawancara penulis, dilakukan tanggal 27 Mei 2023 wawancara ke 10

*“PKB disini cukup membantu, dari bantuan-bantuan yang diberikan seperti adanya pembangunan madrasah, santunan anak yatim piatu ada juga bedah rumah.”<sup>33</sup>*

PKB dikenal di Jekulo karena banyaknya program yang dijalankan dan hal itu sangat membantu masyarakat sehingga PKB menjadi partai yang mendapatkan suara terbanyak di Jekulo. Artinya PKB dikenal dari peran tokoh dan apa program yang dijalankan sangat membantu masyarakat di Kecamatan Jekulo. Lalu bagaimana dengan partisipasi pemilih pada saat Pemilu 2019.

c) Pendekatan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomi berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Secara independen ada banyak informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut, informan Farida mengatakan,

*“Saya memilih itu melihat informasi-informasi terlebih dahulu, mungkin dari internet atau tv sehingga mampu memutuskan apa yang akan pilih. Membandingkan apa visi misi yang cukup membantu untuk membangun Jekulo sehingga saya harus memilihnya.”<sup>34</sup>*

Artinya pemikiran rasional dengan membandingkan visi misi calon yang sejalan dengan kepentingan menjadi alasan untuk memilih PKB. Pendapat ini juga sejalan dengan kata pemilih lainnya yang menjelaskan bahwa PKB memiliki nama besar di Jekulo, namun dia juga mempertimbangkan dengan visi misi dan program yang dijalankan oleh PKB apakah sejalan dengan apa yang telah dijanjikan sebelum pemilu 2019,

*“sebenarnya kalau setiap partai kan pasti memiliki visi misi, namun kalau bagaimana mereka menjalankan janji yang telah digembor-gemborkan dan itu sudah*

---

<sup>33</sup> Murdiati, wawancara penulis pada tanggal 1 Mei 2023, wawancara ke-5

<sup>34</sup> Farida, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 25 Mei wawancara ke-9

*dijalankan dan cukup menjajikan menurut saya pribadi ya dari PKB.*"<sup>35</sup>

Artinya bukan hanya visi misi yang sejalan dengan pemilih, namun juga program yang dijanjikan bukan hanya janji belaka menjadi pertimbangan untuk memilih PKB.

Pemilih rasional memiliki pandangan arah tertentu yang menjadikannya alasan untuk memilih PKB seperti visi misi dan janji yang dijalankan bukan hanya janji palsu. Untuk informasi mengenai visi misi yang dijalankan didapat melalui media internet. Melihat pesatnya teknologi, segala informasi bisa didapat darimana saja,

*"Informasi-informasi mengenai siapa dan apa saja visi misi dari partai kan bisa diakses dimana saja, sebagai anak muda tentunya tidak asing dengan internet. Dari internet saya dapat mengakses segala informasi mengenai partai-partai yang maju dalam Pemilu 2019"*<sup>36</sup>

Akses internet mempermudah pemilih dalam berpikir tentang apa yang akan dipilih. Pemilih cerdas akan memilih dengan mempertimbangkan tentang latar belakang, program yang telah dijalankan serta visi misi yang relevan dengan apa yang telah dijalankan.

## C. Analisis Data

### 1. Strategi PKB

Partai politik agar tetap bertahan dalam pemilu, membutuhkan strategi untuk mendongkrak eksistensi partai itu sendiri. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yaitu taktik dilakukan oleh pemimpin perang untuk meraih kemenangan suatu perang. Strategi dalam artian umum memiliki makna sebuah siasat untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1989, memiliki arti ilmu dan seni yang memaknai segala sumber daya bangsa untuk menjalankan kebijakan tertentu

---

<sup>35</sup> Dina, wawancara penulis, dilakukan pada tanggal 29 Mei wawancara ke-13

<sup>36</sup> Ulya, wawancara penulis dilakukan pada tanggal 28 Mei wawancara ke-12

dalam perang dan damai.<sup>37</sup> Menurut Arnold Steinberg strategi adalah rencana untuk tindakan, proses penentuan rencana seorang pimpinan berfokus pada tujuan jangka panjang partai dan menyiapkan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut disebut strategi.<sup>38</sup> Strategi menurut Prawira adalah langkah untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu atau sebuah siasat paten untuk suatu kegiatan dimana di dalamnya berisi formulasi tujuan dan kumpulan rencana kegiatan.<sup>39</sup>

Untuk keberhasilan pemilu, sistem pemilu dan juga partai politik harus mampu memenuhi beberapa terkhusus partai politik harus memenuhi syarat berikut :

- a. Keterwakilan seluruh kelompok masyarakat dalam lembaga perwakilan, khususnya kelompok minoritas.
- b. Representasi dalam keadilan (equity) mengacu pada strategi yang menunjukkan kekuatan politik dan kepentingan masyarakat dalam lembaga perwakilan.
- c. Representasi dimana individu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pemilihan kandidat; Hubungan antara pemilih dan rakyat yang menjadi bagian dari lembaga yang mewakili rakyat terjalin.

Karena publik mengharapkan pemilu secara signifikan meningkatkan stabilitas pemerintahan dan legitimasi representasi politik, serta demokrasi. Sebaliknya, partai politik harus mampu mengelola potensi konflik, menawarkan alternatif politik bagi permasalahan bangsa, dan menjaga sistem komunikasi masyarakat dan pemerintah tetap terhubung untuk proses politik yang sehat dan bermakna.<sup>40</sup>

Partai politik membutuhkan strategi untuk maju dan lebih dikenal oleh pemilih untuk melanjutkan aspirasi rakyat melalui panggung legislatif. Seperti yang ditunjukkan oleh Peter Schorder, strategi partai politik adalah cara yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik sebuah partai politik sangat penting karena tanpa strategi, perubahan jangka

---

<sup>37</sup> Fatimah and Sari, "Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa.", *Pena Literasi : Jurnal PBSI*, Vol. 1, No.2, (2018): 110.

<sup>38</sup> Sutanto, "*Strategi Partai Demokrat Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Semarang.*", (Universitas Semarang, 2011), 29

<sup>39</sup> Yusri, "Strategi Pembelajaran Andragogi.", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 12, 1, (2017): 28.

<sup>40</sup> Debora Sanur Lindawati, "Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014," *Politica* 4, no. 2 (2014): 297.



panjang tidak mungkin terjadi. Untuk mencapai tujuan politik yang direncanakan, Peter Schorder membagi strategi politik menjadi dua macam yaitu strategi ofensif (penyerangan) dan strategi defensive (bertahan).<sup>41</sup>

PKB merupakan partai yang memiliki nama di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. PKB dikenal banyak masyarakat Jekulo karena dari programnya yang banyak membantu masyarakat terutama di bidang keagamaan. Bantuan PKB dicanangkan guna menaikkan nama PKB untuk tetap eksis dalam Pemilu 2019 terlepas dari nama PKB yang sebenarnya sudah besar karena salah satu pendiri PKB adalah Gusdur yang merupakan cucu dari tokoh besar NU yaitu KH. Hasyim Asyari yang merupakan tokoh besar NU. Berikut adalah strategi PKB dalam meraih suara dalam pemilu legislatif 2019 di Jekulo Kabupaten Kudus :

a. Strategi Komunikasi

PKB di Jekulo Kabupaten Kudus dalam Pemilu 2019 menggunakan strategi sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, sesuai dengan pendekatan intruksi Cak Imin selaku ketua umum PKB. Pendekatan tersebut melibatkan aksi langsung seperti memberikan bantuan bencana atau bantuan lainnya seperti bantuan dibidang agama yaitu bantuan santunan kepada yatim piatu, pengesahan aturan pemberian gaji terhadap guru madrasah atau bantuan pembangunan madrasah. Bentuk loyalitas PKB yang diberikan oleh kepada masyarakatan tentunya merupakan usulan dari masyarakat.

PKB di Jekulo mampu menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah. PKB mampu menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang mana hubungan timbal baliknya adalah masyarakat memberikan suaranya kepada PKB sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap PKB. Drs. H. Ilwani selaku ketua DPC PKB Kudus periode 2013-2020 serta anggota DPR periode 2019-2024, menjelaskan bahwa PKB mengandalkan reses sebagai bentuk sosialisasi.

---

<sup>41</sup> Rifaldi Sahea, Burhan Niode, and Trilke Tulung, "Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 7.



Sebagai kader PKB juga harus terbuka untuk membantu masyarakat.

Sesuai definisi Abdullah yang menjelaskan tentang strategi komunikasi politik yaitu tentang sebuah rancangan yang berupa teknik, metode dan interaksi fungsional antara elemen dan komponen dalam proses komunikasi untuk aktivitas operasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan tepat sasaran. Strategi komunikasi politik berkaitan dengan alur komunikasi yang berlangsung untuk memenangkan pertarungan politik yang dipimpin oleh partai politik atau langsung oleh calon legislatif atau bupati, orang-orang yang ingin mempunyai kekuasaan dan pengaruh maksimal dalam masyarakat sesuai keinginannya.<sup>42</sup>

Komunikasi ke masyarakat langsung yang menyakup mendengarkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh badan legislatif yaitu DPRD untuk membangun pemerintahan baik dalam aturan ataupun pembangunan infrastruktur serta evaluasi rutinannya biasanya dilakukan reses. Reses merupakan masa dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertemu dengan konstituennya. Sidang merupakan bagian penting dalam sistem perwakilan demokrasi karena memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk mendengar langsung dari pemilih mengenai permasalahan dan kebutuhan mereka. Pada masa reses tersebut, anggota DPRD bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, antara lain tokoh masyarakat dan agama, pimpinan puskesmas, dinas setempat, dan organisasi kemasyarakatan. Seluruh lapisan masyarakat yang ikut reses tentunya adalah beberapa orang yang benar-benar mampu menjadi perwakilan masyarakat untuk mengaspirasikan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, reses berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah yang penting antara legislatif dan pemilih, dan memungkinkan

---

<sup>42</sup> Pattiasina, "Strategi Komunikasi Politik Pdi Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014.", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19, 1, (2015): 19.

anggota DPRD untuk lebih memahami dan menanggapi kebutuhan konstituen mereka.<sup>43</sup>

Kegiatan reses sebenarnya lebih fokus dilakukan oleh para DPRD yang menjabat sehingga segala aspirasi dapat didengar dan dipertimbangkan langsung untuk kedepannya melalui kesepakatan pemerintahan sehingga kesepakatan tersebut dapat dijalankan atau tidak. Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana yang menjelaskan bahwa adanya harapan dari masyarakat dalam kegiatan reses, aspirasi mereka dapat diterima dan dibuatkan kebijakannya.<sup>44</sup> Sedangkan pendapat Muhammad Faris Rahman yang dalam penelitiannya yaitu “Optimalisasi Kegiatan Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Bidang Keuangan dan Pembangunan pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut Povinsi Kalimantan Selatan”. Dijelaskannya dalam jurnal tersebut bahwa kegiatan reses anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat ditidak lanjuti melalui sidang paripurna untuk penentuan masukan masyarakat yang harus dijalankan dengan segala pertimbangan.<sup>45</sup>

Selain komunikasi langsung kepada masyarakat harus dijaga, komunikasi dengan anggota harus dijaga. Pentingnya dua arah komunikasi dalam PKB, baik dengan masyarakat dan dalam partai itu sendiri juga harus dijaga. PKB lebih mengandalkan agenda reses sebagai komunikasi kepada masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat Jekulo. Selain itu, komunikasi internal juga penting untuk mencapai kesepakatan dan mencegah konflik internal. PKB biasanya menyelesaikan masalah melalui mufakat dalam rapat internal, seperti memutuskan prioritas bantuan

---

<sup>43</sup> Wenas, Kimbal, and Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon.”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, 2, (2021): 2.

<sup>44</sup> Dewi Kurniasih and Yudi Rusfiana, “Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung,” *Jurnal Academia Praja 4*, no. 2 (2021): 383.

<sup>45</sup> Muhammad Faris Rahman, “Optimalisasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan” (n.d.).

berdasarkan banyaknya masukan dari masyarakat. Keharmonisan internal partai ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga hubungan antar anggota partai.

Strategi komunikasi memiliki fungsi sebagai peningkatan intelektual dan sosial setiap kader, kader akan menjadi lebih dekat dengan masyarakat jika mampu menerapkan strategi komunikasi yang baik kepada masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Johnson dan Edi yang menjelaskan bahwa komunikasi mampu meningkatkan perkembangan intelektual dan sosial individu, artinya dari komunikasi mampu mendekatkan kader dengan masyarakat serta mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kader partai.<sup>46</sup>

Komunikasi di dalam partai politik dapat menjadi pertimbangan partai politik, sehingga mengaktifkan program-program yang direncanakan oleh partai politik bagi masyarakat yang dapat memperkuat eksistensi partai politik. Partai/partai politik mempunyai kemampuan dalam menciptakan perubahan di masyarakat. membangun negara yang lebih maju. Partai politik diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dan positif bagi negara. Negara demokrasi yang didambakan banyak orang dapat tercapai melalui keberadaan partai politik. Meskipun undang-undang saat ini tidak mewajibkan setiap negara untuk memiliki partai politik, menghapuskan partai politik dari masyarakat kita rasanya seperti berabad-abad yang lalu. Dengan kata lain, apapun buruknya citra partai politik kita, harus hadir sebagai tanda modernitas dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Meski ada negara-negara kaya yang tidak memiliki partai politik, kita tidak ingin republik ini ada tanpa partai politik karena partai politik adalah salah satu bentuk demokrasi.<sup>47</sup>

Mengenai komunikasi, pendapat para ahli seperti Katz dan Kahn adalah bahwa komunikasi organisasi

---

<sup>46</sup> Triwicaksono and Nugroho, "Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah.", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 5. 1. (2021): 138.

<sup>47</sup> Ellya Rosana, "Politik Partai Politik Dan Pembangunan," *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 20.

merupakan tranmisi/pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Cocok untuk komunikasi dalam partai politik antar anggota, dimana pertukaran informasi berpotensi menciptakan jaringan informasi di dalam partai. Menurut Pace dan Faules, komunikasi organisasi adalah perilaku yang terjadi dalam suatu organisasi dan cara orang-orang dalam organisasi tersebut berpartisipasi dalam proses dan maelakukan transaksi pertukaran informasi. Artinya dari dalam partai politik begitu penting adanya komunikasi sebagai bentuk pertukaran informasi untuk saling menerima informasi tanpa menjatuhkan pihak lain untuk meminimalisir konflik.<sup>48</sup>

b. Strategi Kaderisasi/Rekrutmen

Konsep pelatihan dan rekrutmen kader baru dalam partai politik sangat dibutuhkan agar partai tetap bertahan dalam Pemilihan Umum. Pendidikan kader seperti upaya mempersiapkan calon pemimpin yang intelektual, jujur, dan tangguh. Hal tersebut merupakan proses penting dalam membangun dan memelihara identitas dan integritas manusia. Di sisi lain, rekrutmen adalah proses pemilihan dan pengangkatan individu atau kelompok individu untuk menduduki posisi dalam sistem pemerintahan. Proses ini penting untuk kelangsungan sistem politik karena memilih individu-individu berbakat dan menempatkan mereka pada posisi kepemimpinan sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan dalam jangka panjang. Dalam konteks partai politik dan pemilihan umum, rekrutmen dan kaderisasi untuk kader baru merupakan proses penting yang menjamin terpilihnya orang-orang yang kompeten, berkomitmen dan jujur untuk bertugas di Parlemen. Proses ini harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, sesuai AD/ART partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

Sistem perekrutan kader dalam partai diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 1 Tahun

---

<sup>48</sup> Fathur Rahman and Dkk, "Komunikasi Dalam Organisasi," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 2, no. 1 (2017): 7.

<sup>49</sup> Zahrinna, "Strategi Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik." (2022): 18.

2011, di dalam UU pada ayat 1 dijelaskan bahwa perekrutan dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta tentang peraturan perundang-undangan terikat dalam Bab XI Pasal 29 ayat 2. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur penting untuk proses rekrutmen. Sementara itu, Ramlan Surbakti menjelaskan rekrutmen politik, atau memilih dan mengangkat individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam sistem politik negara dan sistem politik secara keseluruhan. Partai akan memusatkan pada memilih orang dengan kemampuan yang kuat dan mereka yang memiliki tekad tinggi.<sup>50</sup>

Perekrutan yang dilakukan PKB bisa menjadi keuntungan bagi PKB. Keterbukaan ini berarti PKB tidak memihak dan terbuka terhadap keinginan berbagai pihak. Di Jekulo sendiri, berdasarkan pemilu 2019, ia mampu meraih suara terbanyak untuk PKB. Fungsi dari perekrutan adalah untuk membangun partai agar lebih maju, jika diibaratkan dengan tumbuhan adalah menanam. Dari menanam diharapkan mampu melahirkan banyak anggota baru yang terintergritas melalui pemilihan bibit unggul.

Dijelaskan dalam pasal 98 bab 12 Kaderisasi dalam AD/ART PKB<sup>51</sup>, bahwa pengkaderan dalam PKB juga terdapat aturan yang mengikat yaitu :

- 1) Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis
- 2) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau pemerintahan
- 3) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penilaian kinerja Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.
- 4) Sistem, bentuk, kurikulum serta modul kaderisasi ditetapkan dalam peraturan partai.

---

<sup>50</sup> Lindawati, "Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014.", *Politica*, 4, No.2, (2014): 293.

<sup>51</sup> "AD ART PKB 2019.pdf," n.d.



Rekrutmen anggota partai melalui sistem kaderisasi merupakan syarat wajib bagi seluruh pengurus dan anggota partai yang ingin dipromosikan ke posisi strategis baik di internal pimpinan partai maupun pemerintahan. Evaluasi kinerja menurut tingkat Komite Eksekutif Partai juga bermula dari pembentukan kader, dan sistem kader, bentuk, kurikulum dan modulnya terikat pada peraturan Partai. Para kader baru juga diusahakan mampu berkomunikasi dengan baik dengan baik kepada masyarakat sehingga mampu menarik simpatik masyarakat untuk meningkatkan eksistensi partai.

Jekulo merupakan wilayah yang memiliki banyak pondok pesantren, bisa dikatakan sejalan dengan PKB yang merupakan partai hijau sehingga tidak langsung mampu menarik simpatik masyarakat. Dukungan tidak langsung dari masyarakat berasal dari adanya kesamaan tujuan, Jekulo dengan banyak santri di wilayahnya mampu menjadi alasan kuat PKB mampu bertahan di Jekulo.

PKB memiliki pendekatan terbuka dalam merekrut kader baru, tanpa syarat tertentu. Menurut Na'im selaku staf DPC PKB Kudus, bahwa partai bersifat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, tanpa memandang latar belakang fisik ataupun intelektualnya. Kader baru di PKB akan memulai dari nol dan akan belajar sampai naik jabatan secara bertahap. Keterbukanaan PKB mampu menjadi kekuatan untuk PKB dalam menerima aspirasi masyarakat yang beragam. Meski nama PKB identik dengan NU, PKB tidak memihak manapun dan terbuka untuk siapapun yang memiliki kesamaan visi misi dengan PKB.

Perlu diketahui bahwa nama PKB tidak jauh dukungan masyarakat NU karena kekuatan kepercayaan tokoh begitu besar. Tokoh besar dalam pendirian PKB sendiri adalah Gusdur yang merupakan salah satu pendiri PKB dan juga merupakan cucu dari K. H. Hasyim Asyari yaitu tokoh besar NU. Meski demikian, PKB dan NU tidak bisa dikatakan sama. Antara PKB dan NU bukan hal bisa yang dikatakan sama, karena PKB organisasi yang berjalan dalam ranah politik. Maka tidak semua rakyat yang berada dalam organisasi yang berada dalam

naungan seperti IPNU, IPPNU Ansor, Fatayat, Muslimat dan lainnya pasti menjadi bagian PKB, bisa saja mereka berada di partai lain yang menurutnya partai tersebut memiliki kesamaan visi misi dengannya.<sup>52</sup>

Mengenai konteks pengkaderan, PKB telah menentukan sistem yang terstruktur. Aturan dan sistem pengkaderan PKB diatur dalam Pasal 98 Bab 12 AD/ART PKB. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam perekrutan anggota dan pengurus partai dilakukan melalui kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis.

Sistem tersebut menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang ingin mendapatkan promosi jabatan strategis, baik di internal partai maupun pemerintahan. Evaluasi kinerja Dewan Pengurus Partai juga terkait dengan sistem kaderisasi untuk melahirkan kader-kader yang unggul. Selain evaluasi, sistem, bentuk kurikulum dan modul kaderisasi ditetapkan dalam peraturan partai. Dapat disimpulkan bahwa pengkaderan PKB memiliki aturan dan sistem yang terikat dan sistematis.

Tahapan pengkaderan PKB meliputi pemahaman fundamental tentang PKB, pemupukan loyalitas dan penguatan pengabdian, tahap selanjutnya melibatkan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi pemahaman ideologi partai dan penumbuhan kreatifitas, dan tahap terakhir adalah pengajaran berpikir futuristik dan pengembangan kemampuan konseptual. Kader PKB juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan eksistensi PKB di Jekulo khususnya mengedepankan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Wilayah Jekulo dengan banyaknya pondok pesantren besar mampu menjadi pendukung wilayah strategis untuk sosialisasi dan memperoleh dukungan masyarakat.

Menurut Kamisa dalam buku Syarifuddin, kata kader berkaitan dengan individu suatu organisasi atau

---

<sup>52</sup> Ali, "Peran Lembaga NU (Nadlatul Ulama) Dalam Mendukung Perolehan Suara PKB Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Ternate Tahun 2009," *Jurnal Politico* 2, no. 2 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1450>.

persyarikatan termasuk partai juga. Sama halnya dengan kader adalah individu yang ditunjuk sebagai penerus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan suatu partai. Sedangkan pengkaderan adalah proses mendidik individu untuk menjadi kader.<sup>53</sup> Selain menjadi proses mendidik, kaderisasi juga bisa menjadi bahan untuk evaluasi. Menurut Mangkubumi kaderisasi adalah siklus yang berputar terus dengan gradasi yang meningkat dan dapat dibedakan menjadi tiga komponen utama, yaitu : pendidikan kader, penugasan kader dan pengerahan kader artinya kader mengemban tanggung jawab dari aspek perjuangan sesuai potensi dan kemampuan yang ada.<sup>54</sup>

c. Strategi sayap partai

Partai politik seperti PKB dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan organisasi lain yang dapat lebih dekat dengan masyarakat. PKB di Kudus misalnya memiliki beberapa organisasi dibawahnya seperti Garda Bangsa (Gerakan Pemuda Bangsa), Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa), Perempuan Bangsa, Gerbang Tani, DPC Garda BMI Kabupaten Kudus, DPC Garda Santri Kabupaten Kudus dan KGB (Koordinasi Garda Bangsa). Organisasi-organisasi tersebut memungkinkan PKB untuk terjun langsung ke masyarakat dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyediakan berbagai wadah untuk berbagai kelompok agar masyarakat mampu ikut berpartisipasi dalam politik. Misalnya, Perempuan Bangsa adalah wadah bagi perempuan untuk berpolitik, memberikan mereka tempat untuk bersuara dalam dunia yang sering didominasi oleh laki-laki. Garda Bangsa dan Perempuan Bangsa memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan mudah. Untuk mahasiswa, PKB

---

<sup>53</sup> Risaldi, I. . *Perbedaan Kualitas Manajerial Siswa Kaderisasi KPM (Komunitas Pelajar Muslim) dan Siswa Non Organisasi di SMA Negeri 1 Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). (2010): 32.

<sup>54</sup> Muhammad Rizki Syahputra and T Darmansah, "Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan," *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 2, no. 3 (2020): 24.

menyediakan Germasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa). Meskipun Germasaba kurang aktif di tingkat kecamatan atau desa karena mahasiswa cenderung lebih aktif di kampus mereka. Selain itu, Ada juga Garda Tani, yang tampaknya masih baru dan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kepercayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, PKB berusaha untuk mencakup berbagai kelompok dalam masyarakat dan memberikan mereka wadah untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Imam Ropii dalam penelitiannya “Peranan Dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai Politik ”, membahas eksistensi partai politik dan organisasi masa sayap partai dalam sistem politik Indonesia sangat compatible. Legalitas organisasi sayap dalam undangundang partai politik menjadikan institusi partai politik menjadi seharusnya lebih kokoh dan membumi di arus bawah karena disokong dan difasilitasi komunikasinya oleh ormas sayapnya. Soliditas antara parpol dan ormas sayap sedikit banyak ditentukan oleh harmonis dan sinergitas tidaknya hubungan yang dibangun oleh mereka.<sup>55</sup>

## 2. Sikap Pemilih

Indonesia merupakan negara demokratis yang mana setiap lima tahun sekali akan diadakan Pemilu, pemilih seringkali dipengaruhi oleh tokoh masyarakat atau pemimpin lokal. Misalnya saja di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, peran individu sangat kuat dan seringkali mempengaruhi pilihan pemilih, terutama di kalangan generasi tua. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai tindakan aktif dalam politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, negara demokratis, pemilih mempunyai peran penting dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilu. Pemilih juga seringkali memilih partai berdasarkan ideologi atau visi dan misi yang selaras dengan keyakinannya. Perilaku pemilih dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan yaitu pendekatan Sosiologi, Psikologi, dan Rasional.

---

<sup>55</sup> Ropii, “Peranan Dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai Politik.”, Jurnal Konstitusi Unidha, (2020): 10

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi dalam perilaku pemilih, di mana pemilih membuat pilihan berdasarkan faktor lingkungan seperti agama, keluarga, keanggotaan organisasi, usia, geografi, dan pendidikan. Dalam artian lain menurut Paul F. Lazarsfeld dalam bukunya yang berjudul *The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* dalam pendapatnya bahwa seseorang pemilih hidup dalam konteks tertentu, yaitu status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya.<sup>56</sup> Artinya adalah adanya hubungan lingkaran sosial antara pemilih dengan calon yang dipilih.

Wilayah Jekulo, faktor agama dan pengaruh tokoh masyarakat menjadi alasan kuat dalam pemilihan PKB pada Pemilu 2019. Misalnya, beberapa pemilih di Jekulo cenderung mengikuti panduan dari tokoh agama mereka. Selain itu, keberadaan perwakilan masyarakat Jekulo di DPRD dari fraksi PKB, seperti H. Mukhasiron, S.Ag, PhD. H. Ilwani dan H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd, juga turut mempengaruhi pilihan pemilih. Peran historis dan pengaruh Gusdur, pendiri PKB dan mantan presiden Indonesia, yang sangat dihormati di kalangan NU dan mempunyai pengaruh besar terhadap PKB. Tokoh agama seperti K.H. Ilwani dan H. Mukhasiron, yang juga merupakan kader PKB dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih. Masyarakat cenderung mempercayai keputusan pemimpin agamanya. Usia juga mempengaruhi perilaku memilih. Pemilih yang lebih tua cenderung mudah terpengaruh dan lebih percaya pada figur yang mereka anggap dapat dipercaya. Pada saat yang sama, pemilih muda cenderung lebih mampu berpikir dan menentukan pilihannya sendiri.

Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi pemilu. PKB dikenal mendukung pendidikan agama dan pembangunan infrastruktur madrasah sehingga membuat masyarakat memilih PKB. Dengan banyaknya pesantren dan pesantren di Jekulo, tak heran jika PKB mendapat suara terbanyak di daerah tersebut. Selain itu, aspek keluarga dan geografis dapat mempengaruhi perilaku memilih. Dalam konteks

---

<sup>56</sup> Syafhendry, *Perilaku Pemilih Teori Dan Praktek, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951., 2016.



keluarga, sebagian pemilih mungkin memilih untuk mengikuti jejak atau pilihan keluarganya, terutama jika mereka sendiri acuh tak acuh atau tidak tertarik pada isu-isu politik. Geografi juga mempengaruhi seleksi. Di Jekulo, PKB menjadi pilihan populer, terutama karena banyaknya kandidat yang ada di kabupaten tersebut. Kandidat-kandidat ini, seperti H. Ahmad Khairil Badawi, S.Pd., K.H. Muhamad Jazuli, S.Ag., M.H., H. Mukhasiron, S.Ag dan Drs. H. Ilwani, dikenal dan dihargai oleh masyarakat setempat, yang cenderung memilih mereka karena kesamaan wilayah dan rasa empati.

Pendekatan sosiologi mengkategorikan pemilih pada lingkaran sosial antara pemilih dengan yang dipilih dimana empati pemilih terukur dari adanya hubungan sosial yang sama. Pendekatan sosiologi berasal dari Eropa dan kemudian berkembang di Amerika. Ini pertama kali dikembangkan oleh Kantor Universitas Ilmu Sosial Terapan Kolombia, oleh karena itu lebih dikenal sebagai Grup Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai pemilu tahun 1948 dan 1952. Karya ini menunjukkan bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ikatan sosial ekonomi, etnis, tradisi keluarga, keanggotaan dalam organisasi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, geografis dll. Dalam pendekatan ini, faktor agama, pendidikan, gender, geografis, budaya, dan sosial menjadi variabel dominan yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.<sup>57</sup>

b. Pendekatan psikologis

Pendekatan Psikologi terhadap perilaku pemilih yaitu pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan daya tarik pribadi, seperti karisma seorang kandidat atau keyakinan mereka terhadap kualitas yang dimiliki kandidat tersebut. Misalnya di Jekulo ada Drs. H. Ilwani karena mereka mempercayainya dan menganggapnya sebagai wakil rakyat yang dapat dipercaya. Drs. H. Ilwani yang terpilih pada pemilu 2014 tetap menjaga citra dan kualitasnya sehingga mampu menarik simpati pemilih. Selain itu, PKB dikenal di Jekulo karena program-program yang diusungnya, seperti membantu renovasi rumah, membangun sekolah, dan

---

<sup>57</sup> Tri, "Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan.", No. 1, (2019): 2.

menyantuni anak yatim piatu. Program-program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat menjadikan PKB sebagai partai peraih suara terbanyak di Jekulo. Kesimpulannya adalah menurut pendekatan psikologis, pemilih cenderung mengambil pilihan berdasarkan penilaian pribadi terhadap kualitas dan daya tarik kandidat, serta program yang dijalankan partai.

Pendekatan psikologis mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepribadian calon, sehingga setiap karakter harus memiliki kharisma untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Kualitas seorang calon untuk memimpin suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh upaya dan integritasnya, tetapi juga oleh kredibilitasnya atau apa yang telah dilakukannya sebelum pemilu. Namun dalam menentukan pilihannya, pemilih lebih tertarik pada masa depan atau hasilnya, apakah proses pilkada akan menghasilkan pemimpin daerah yang akan berusaha membawa masyarakat ke arah yang lebih baik atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa ciri-ciri kepribadian tidak muncul dari sebab-sebab melainkan dari akibat interaksi sosial. Soemijo, W dalam bukunya *Pemimpin dan Kepemimpinan* mengemukakan bahwa “Kepemimpinan sebagai hasil proses sosial merupakan hubungan interpersonal yang penyesuaiannya dilakukan oleh pihak lain”.<sup>58</sup>

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional terhadap perilaku pemilih dimana pemilih mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional terkait visi, misi, dan program kandidat. Misalnya di Jekulo, beberapa pemilih membandingkan visi dan misi kandidat yang berbeda dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Informasi yang diperoleh oleh para pemilih bisa berasal dari internet, televisi, maupun media lainnya menyangkut informasi kandidat dalam pemilu. Selain itu, pemilih yang rasional juga mempertanyakan apakah partai akan menepati janjinya. Jika partai melaksanakan program yang dijanjikan dan konsisten dengan visi dan misi partai, maka pemilih cenderung memilih partai tersebut. Oleh karena itu, dalam pendekatan pilihan rasional, pemilih mengambil keputusan

---

<sup>58</sup> Syafhendry, *Perilaku Pemilih Teori Dan Praktek.*, (Angewandte Chemie, International Edition 6, 2016) 39.

berdasarkan penilaian mereka terhadap visi, misi, dan program kandidat, serta sejauh mana kandidat telah melaksanakan janjinya.

Perilaku pemilu yang rasional ini sebenarnya merupakan wujud dari sistem ekonomi dan demokrasi yang sudah mapan. Menurut Duch et al Stevenson adanya hubungan sebab akibat menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih juga dipengaruhi oleh model penawaran dan permintaan dalam perekonomian, terutama cara politisi menjalankan kebijakan ekonomi dan dampaknya. McAllister, Sheppard, & Bean berpendapat bahwa hal tersebut berdampak pada evaluasi kritis pemilih baik secara retrospektif maupun prospektif. Analisis retrospektif adalah upaya pemilih untuk melihat kembali apa yang telah dicapai dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Pada saat yang sama, analisis ke depan lebih fokus pada upaya pemilih untuk melihat secara kritis berbagai program yang diajukan kandidat dan partainya. Bingham Powell & Whitten, 1993 menyebut bahwa ada berbagai indikator politik yang menggambarkan kondisi mikroekonomi, seperti tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita, merupakan faktor evaluatif penting bagi pemilih yang rasional. Dengan demikian, ciri dasar munculnya pemilih rasional adalah penilaian berdasarkan reaksi terhadap dampak ekonomi. Dengan kata lain, pragmatisme menjadi kata kunci ketika mempertimbangkan posisi politik kelompok pemilih rasional ini.<sup>59</sup>

Konsep perilaku pemilih, seperti yang dijelaskan oleh J. Kristiadi, merujuk pada kecenderungan individu untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, sosiologi dan rasional mereka.<sup>60</sup> AA. Oka Mahendra mendefinisikan perilaku pemilih sebagai partisipasi seseorang dalam memilih individu, partai politik atau isu publik tertentu.<sup>61</sup> Menurut Ramlan Surbakti, perilaku

---

<sup>59</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Perilaku Memilih Rasional Dalam Pemilu Indonesia Kontemporer," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 78.

<sup>60</sup> Rantelore, Gosal, and Kimbal, "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan."

<sup>61</sup> Rozi, M. F. (2019). Eksistensi Masyarakat Pasca Pilakada Pamekasan 2018: Studi Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan melalui Pendekatan Sosiologi Agama. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(02), 223.

pemilih adalah sebagian dari perilaku politik yang mencakup partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan, seperti memutuskan untuk memilih atau tidak dan jika memilih, memilih kandidat mana. Dengan demikian, perilaku pemilih dapat disimpulkan sebagai tindakan seseorang dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, dengan fokus pada alasan mengapa pemilih memilih partai atau kandidat tertentu dibandingkan dengan yang lain.

